



PENERAPAN FUNGSI KELUARGA DAN PERAN LINTAS SEKTOR PADA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI KALIMANTAN SELATAN

Warjiman¹, Theresia Ivana², Ermeisi Er Unja³, Lanawati⁴, Uniek Mulyaning Sari⁵, Yunitia Insani⁶ dan Oktriyanto⁷

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suaka Insan Banjarmasin
Jalan Zafri Zam-Zam, No.8. Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, 735116,

^{5,6}Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Selatan
Jalan Gatot Subroto No.9, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia, 70235.

⁷Pusat Riset Kependudukan - Badan Riset dan Inovasi Nasional
Jalan Gatot Subroto No.10, RT.2/RW.2, Kuningan Bar., Kec. Mampang Prpt., Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

e-mail : meisiunja10@gmail.com^{1,2,3,4}, litbangbkkbnkalsel@gmail.com^{5,6},
oktriyanto@yahoo.com⁷

ABSTRAK

Melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), pemerintah menginginkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga melalui Program Kampung KB. Isu-isu strategis yang muncul salah satunya adalah rendahnya keluarga yang mengetahui delapan fungsi keluarga dimana peran keluarga dalam pembangunan karakter bangsa belum menggembirakan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi penerapan delapan fungsi keluarga dan peran lintas sektor pada Kampung KB di Kalimantan Selatan. Penelitian ini merupakan cross sectional study dengan pendekatan mix method dimana data dikumpulkan menggunakan instrumen kuesioner 8 fungsi keluarga dan wawancara terstruktur. Sampel pada penelitian ini berjumlah 175 keluarga dan 8 orang informan yang tersebar di 5 Kampung KB Percontohan di 5 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ke 8 fungsi keluarga yang dijalankan oleh setiap keluarga dalam kategori "Baik" dan "Cukup". Semua fungsi terlihat beraneka ragam dari setiap kabupatennya. Peran lintas sektor dari setiap kabupaten baik instansi pemerintah maupun swasta, memiliki dampak yang besar dalam pengembangan pembangunan di masyarakat. Semakin banyak lintas sektor yang terlibat, maka semakin banyak perubahan yang terjadi di masyarakat menjadi lebih baik. Pemerintah disarankan untuk tetap bisa melanjutkan program Bangga Kencana dengan fungsi monitoring yang lebih baik lagi.

Kata kunci : Delapan Fungsi Keluarga, Kampung KB, lintas sektor

ABSTRACT

Through the Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), the government wants population development and family development through the Program Kampung KB. One of the strategic issues that arise is the lack of family knowledge of family functions where the role of the family in the development of the nation's character has not been encouraging, therefore this study was conducted to identify the application of eight family functions and cross-sectoral roles. This research is a cross sectional study with a mix method approach where data is collected using a questionnaire instrument consist of eight family functions and structured interviews. The sample in this study amounted to 175 families and 8 informant spread over five Kampung KB Percontohan (Pilot Family Planning Village) in five districts/cities in Kalimantan Selatan. The results of this study indicate that the eight family functions carried out by each family are in the "Good" and "Enough" categories. All functions look different from each district. The role of cross-sectors, both government and private agencies, has a major impact on the development of development in the community. The more cross-sectors involved, the more changes that occur in society for the better. The government is advised to continue the Bangga Kencana program with a better monitoring function.

Keywords : *Eight Family Functions, Family Planning Village, cross-sectoral roles*

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan poin utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam sebuah negara. Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, mengamanatkan penduduk sebagai modal dasar pembangunan. Sebagai modal dasar sebuah pembangunan, maka setiap keluarga di Indonesia diharapkan mampu melaksanakan dan memaksimalkan fungsi-fungsi di dalam keluarga. Fungsi tersebut dikenal sebagai: (1) Fungsi Keagamaan, (2) Fungsi Sosial Budaya, (3) Fungsi Cinta Kasih, (4) Fungsi Perlindungan, (5) Fungsi Reproduksi, (6) Fungsi Sosial dan Pendidikan, (7) Fungsi Ekonomi, serta (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan (Peraturan Pemerintah Nomor 87, 2014).

Studi-studi terdahulu mencatat poin penting terkait peran besar keluarga dalam menciptakan masyarakat yang sehat yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan sebuah negara. Dalam studi-studi tersebut, diungkapkan bahwa keterbatasan masyarakat menerapkan 8 fungsi keluarga di atas, mengakibatkan timbulnya masalah kesehatan, kemiskinan, kasus penganiayaan, rendahnya tingkat pendidikan, penurunan kualitas dan kepuasan hidup pada remaja (Carlson & Magnusan, 2011; Case & Paxson, 2002; Krok, 2016; Ho *et al.*, 2016; Bidang

Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, 2020). Sebagai contoh, WHO menginformasikan pada tahun 2016, angka kematian di dunia yang diakibatkan lingkungan yang tidak sehat berkisar 13,7 juta orang. Hal ini dikaitkan dengan rendahnya penerapan fungsi lingkungan dalam keluarga (WHO, 2016).

Selain masalah tersebut, *Center for Disease Control and Prevention* (CDC) pada tahun yang sama, menunjukkan bahwa ketidakmampuan keluarga mengembangkan fungsi ekonomi dan perlindungan mengakibatkan angka penganiayaan anak, baik fisik, psikologis, seksual dan pengabaian terjadi di banyak negara (CDC, 2016). Di sisi lain, studi lainnya mencatat hal penting bahwa ketidakmampuan atau keterbatasan keluarga menerapkan fungsi cinta kasih dan keagamaan dalam keluarga, mengakibatkan anak dalam keluarga tersebut cenderung memiliki kualitas hidup yang buruk dan memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah (Krok, 2016; Ho *et al.*, 2016). Masalah lainnya muncul dalam masyarakat berkaitan dengan ketidakmampuan menerapkan fungsi reproduksi dalam keluarga. Hasil penelitian Hood, dkk., (2009) sebelumnya di Amerika, menemukan bahwa anak remaja dalam keluarga yang tidak menerapkan fungsi

reproduksi cenderung melakukan hubungan seksual pada usia muda, antara 15-19 tahun. Kondisi yang tidak ideal dalam penerapan fungsi reproduksi ini, mengakibatkan meningkatnya angka kehamilan dan kematian pada ibu melahirkan (WHO, 2017). Tidak hanya hal tersebut, fungsi reproduksi yang tidak berjalan dalam keluarga, juga meningkatkan praktik seksual berisiko yang dilakukan remaja, bahkan penggunaan obat-obatan, dan risiko terinfeksi HIV (CDC, 2019).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penerapan fungsi keluarga adalah suatu poin penting dalam keberhasilan sebuah program pembangunan dalam suatu negara. Keluarga sebagai gambaran kecil dari sebuah komunitas, harus mampu menerapkan fungsi-fungsinya agar tercipta pondasi yang sehat dan ideal dalam masyarakat. Penerapan 8 fungsi keluarga ini, pada dasarnya telah difasilitasi oleh pemerintah melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Meski demikian, tantangan besar dalam program tersebut berasal dari pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait 8 fungsi keluarga yang masih rendah. Hal ini dibuktikan dalam Rencana Strategi (Renstra) BKKBN tahun 2020-2024 yang mencatat bahwa pemahaman dan kesadaran keluarga terkait 8 fungsi tersebut baru mencapai angka 38% (Renstra BKKBN, 2020).

Sebagai bentuk dukungan dan komitmen tersebut, pada tahun 2016 pemerintah meluncurkan program kampung KB, yang berfokus pada program pembangunan multi sektor dengan berorientasi pada pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Program KB dibentuk untuk memaksimalkan kemampuan masyarakat dalam menerapkan 8 fungsi keluarga. Meski demikian, program tersebut menemukan banyak tantangan, terutama terkait motivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan kampung KB. Salah satu upaya yang dilakukan oleh BKKBN adalah dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat provinsi dan kabupaten. Tim ini diisi oleh lintas sektor yaitu

Perwakilan BKKBN Provinsi, Organisasi Perangkat Daerah Keluarga Berencana (OPDKB), Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Kesehatan, dan dinas lain yang dianggap strategis. Melalui tim Pokja, koordinasi dan komunikasi antara Kampung KB binaan dapat terjalin (Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, 2020).

Provinsi Kalimantan Selatan pun, telah menjalankan program tersebut yang dibawah langsung oleh BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Program tersebut, telah berjalan di berbagai kabupaten di Kalimantan Selatan. Akan tetapi, dalam laporan Normajatun (2018), yang dilakukan pada Kampung Keluarga Berencana-Kampung Baiman (KKB-KB) di Kota Banjarmasin, ditemukan bahwa program pembinaan masih belum optimal dikembangkan. Pengembangan lebih fokus pada fungsi pembinaan lingkungan. Temuan tersebut berbanding terbalik dengan temuan pada provinsi lain, masalah pengembangan justru lebih pada masalah internal program yang terkait anggaran (Zultha, 2017).

Penjelasan tersebut mengidentifikasi bahwa permasalahan dalam pengembangan program di wilayah Kalimantan Selatan diakibatkan dari pemahaman dan pengetahuan masyarakat terkait 8 fungsi keluarga. Sehingga, sangat penting mengukur sejauh mana gambaran penerapan 8 fungsi keluarga yang berada di wilayah binaan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan. Di sisi lain, penting pula untuk mengeksplorasi seberapa besar peran dari lintas sektor yang berada di wilayah Kampung KB binaan terlibat dalam memaksimalkan penerapan 8 fungsi tersebut. Melalui pengukuran terhadap gambaran penerapan tersebut dan juga eksplorasi terhadap keterlibatan lintas sektor, analisis terhadap hambatan penerapan 8 fungsi keluarga dapat terdeteksi. Ke depannya, temuan terkait hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan bagi BKKBN dan sektor terkait dalam merumuskan kebijakan, program yang akan

dilaksanakan bahkan anggaran yang akan digunakan.

METODE PENELITIAN

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan selama bulan Agustus 2021, di 5 (lima) kabupaten/kota wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu di Desa Kampung Baru, Kabupaten Tanah Laut; Desa Barokah, Kabupaten Banjar; Desa Bitahan Baru, Kabupaten Tapin; Desa Simpang Empat, Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan Desa Biuku, Kota Banjarmasin.

Teknik sampling yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan pendekatan *quota sampling*. Jumlah sampel yang terlibat adalah 175 keluarga dari 5 kampung KB percontohan di 5 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara untuk informan dari lintas sektor sebanyak 8 informan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner untuk mengukur gambaran penerapan 8 fungsi keluarga. Sementara untuk mengeksplorasi keterlibatan lintas sektor dalam penerapan tersebut menggunakan wawancara terstruktur dengan bantuan panduan daftar pertanyaan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai gambaran penerapan 8 fungsi keluarga dan keterlibatan lintas sektor. Analisa dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, karakteristik keluarga yang terlibat sangat beragam. Adapun karakteristik responden dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Responden

N	Karakteristik Responden	N	Persentase
1	Umur		
	a. < 25 Tahun	27	15%
	b. 26-45 Tahun	102	58%
	c. >45 tahun	46	26%
	Total		100%
2	Jenis Kelamin		
	a. Laki-laki	52	30%

	b. Perempuan	123	70%
	Total		100%
3	Tipologi Keluarga		
	a. Keluarga utuh	129	74%
	b. Keluarga tidak utuh	46	26%
	Total		100%

Sumber: Data Primer 2021

Apabila dilihat dari data di atas, kisaran usia 26-45 tahun merupakan usia keluarga yang paling dominan pada 5 kabupaten tempat penelitian. Usia tersebut masuk ke dalam kelompok usia dewasa produktif. Usia tersebut adalah usia yang sangat ideal untuk mengolah informasi baru di sekitarnya. Rasily, dkk., (2016) menjabarkan usia mempengaruhi perkembangan daya tangkap dan pola pikir seseorang. Bertambahnya umur seseorang dapat berpengaruh pada penambahan pengetahuan yang diperolehnya.

Bila dilihat dari hal tersebut, potensi untuk memaksimalkan penerapan 8 fungsi keluarga sangat mungkin dilakukan oleh keluarga. Bila penerapan ini dikaitkan dengan pemahaman dan pengetahuan, maka usia seseorang kemungkinan besar memberikan peranan penting dalam penerapan tersebut.

Sementara itu, responden yang terlibat mayoritas berjenis kelamin perempuan. Banyaknya perempuan yang terlibat dalam penelitian ini, dikaitkan dengan adanya konstruksi sosial di masyarakat yang menganggap bahwa fungsi keluarga merupakan tanggung jawab perempuan. Studi terdahulu, memaparkan bagaimana perempuan dikonstruksikan sebagai ibu dalam keluarga yang memiliki tugas utama mendidik dan menjaga kesejahteraan fisik dan psikologis keluarganya (Dimiyati, 2018). Bila dihubungkan dengan penerapan 8 fungsi keluarga, temuan ini akan menjadi tantangan ke depannya bagi pemerintah dalam memaksimalkan potensi keluarga sebagai penunjang pembangunan berkelanjutan. Hal ini disebabkan, 8 fungsi keluarga adalah fungsi yang kompleks dan membutuhkan banyak peran di dalamnya. Artinya, bila penerapan fungsi keluarga ini hanya dibebankan pada ibu atau perempuan dalam keluarga tersebut, maka potensi tidak

maksimalnya penerapan 8 fungsi keluarga dapat terjadi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tipologi keluarga yang terlibat mayoritas adalah keluarga utuh. Artinya, keluarga yang terlibat dalam penelitian ini dikategorikan sebagai keluarga yang ideal untuk menerapkan 8 fungsi keluarga. Studi sebelumnya, menguraikan bahwa tipologi keluarga utuh maupun tidak utuh, menjadi faktor yang mempengaruhi relasi dalam keluarga tersebut. Pada keluarga yang utuh, perhatian terhadap isu fisik, psikologis dan sosial anggota keluarga cenderung mendapatkan perhatian yang maksimal. Sehingga, potensi menerapkan 8 fungsi keluarga bisa maksimal. Sementara pada keluarga yang tidak utuh, penerapan 8 fungsi keluarga ini bisa tidak berjalan dengan baik. Hal ini dikaitkan dengan adanya kecenderungan pada keluarga yang tidak utuh, perhatian terhadap 3 isu tersebut di atas terabaikan (Willis, 2009).

Selanjutnya, hasil terkait penerapan 8 fungsi keluarga, dapat dilihat pada tabel 2, di bawah ini.

Tabel 2. Penerapan 8 fungsi keluarga

Kabupaten	Penerapan 8 Fungsi Keluarga						Total	%
	Kurang		Cukup		Baik			
	F	%	F	%	F	%		
Kota Banjarmasin	1	3%	11	31%	23	66%	35	100%
Kabupaten Banjar	3	9%	12	34%	20	57%	35	100%
Kabupaten Tapin	3	9%	14	40%	18	51%	35	100%
Kabupaten Hulu Sungai Utara	3	9%	17	49%	15	43%	35	100%
Kabupaten Tanah Laut	0	0%	12	34%	23	66%	35	100%
Total	10	6%	66	38%	99	57%	175	100%

Sumber: Data Primer 2021

Melalui proses pengukuran kuantitatif, penelitian ini menemukan bahwa penerapan 8 fungsi keluarga di 5 desa percontohan KB pada 5 kabupaten wilayah binaan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan adalah baik dengan presentase sebesar 57%.

Ada banyak faktor yang dapat menjadi penyebab dari temuan tersebut. Bila dilihat dari telaah literatur, penerapan fungsi keluarga ini sangat dipengaruhi oleh struktur keluarga, latar belakang kultural dan status ekonomi keluarga (Banovcinova et al, 2014; Dai & Wang, 2015). Faktor demografi, usia dan pendidikan juga berperan penting dalam keberhasilan penerapan 8 fungsi keluarga (Pamungkas, dkk., 2018).

Bila dikaitkan dengan karakteristik usia responden yang terlibat, dapat dilihat bahwa usia responden adalah usia ideal untuk mengolah pengetahuan yang diterima dengan memaksimalkan latar belakang yang dimilikinya. Ditambah lagi adanya kelompok kerja dan kader BKKBN, dianggap sebagai faktor tambahan yang membantu keluarga memaksimalkan pemahamannya terhadap 8 fungsi keluarga, sehingga keluarga yang ditemukan dalam penelitian ini mampu menerapkan 8 fungsi keluarga.

Meskipun demikian, persentase tersebut tidaklah menggembirakan. Hal ini dikarenakan persentase 57% baik tersebut diikuti oleh persentase penerapan yang cukup baik sejumlah 38%, bahkan masih ditemukan 6% keluarga yang kurang baik dalam menerapkan 8 fungsi keluarga tersebut. Menurut peneliti, persentase baik yang hanya mencapai 57% menggambarkan bahwa penerapan 8 fungsi oleh keluarga masih belum optimal. Kondisi ini perlu dieksplorasi lebih lanjut, dikarenakan studi sebelumnya pada Kampung KB di kota Banjarmasin pun menemukan hal yang sama, dimana program pembinaan masih belum optimal dikembangkan (Normajatun, 2018). Belum optimalnya penerapan ini dikaitkan dengan adanya komponen dalam 8 fungsi tersebut yang masih kurang dan cukup baik diterapkan oleh keluarga.

Analisis terhadap indikator 8 fungsi keluarga dalam penelitian ini menemukan bahwa pada fungsi keagamaan mampu diterapkan dengan baik dan cukup baik oleh keluarga yang berada di 4 kampung KB percontohan. Akan tetapi, ada 1 kampung KB percontohan yang masih kurang dalam penerapan fungsi tersebut. Peneliti berpendapat bahwa kemampuan keluarga dalam menerapkan fungsi keagamaan

menjadi sebuah pondasi yang baik dalam memaksimalkan fungsi keluarganya.

Dengan berjalannya fungsi keagamaan, maka setiap keluarga menjadi individu yang memiliki dasar nilai dan prinsip dalam kehidupan, sehingga dapat membantu keluarga menyadari hal-hal penting terkait toleransi, gotong-royong dan tolong-menolong. Di sisi lain, fungsi keagamaan akan membantu mengarahkan keluarga dalam berdinamika di masyarakat, sehingga keluarga mampu menghadapi perbedaan dan memiliki sikap toleransi (Hood, et al., 2009). Berfungsinya keagamaan dalam keluarga, akan mampu membantu keluarga menciptakan keluarga yang lebih berkualitas, dikarenakan keyakinan terhadap agama akan membantu individu dalam bersikap dan berperilaku lebih baik, dan mampu memaknai kehidupan menjadi lebih positif (Novitasari, dkk., 2021).

Sementara pada indikator fungsi sosial budaya, mayoritas ditemukan keluarga mampu menerapkan fungsi ini. Meski demikian, penelitian ini mencatat poin penting bahwa di kelima tempat penelitian, masih ada keluarga yang kurang menerapkan fungsi ini. Kurangnya penerapan fungsi sosial budaya, dapat menjadi tantangan dalam pembinaan masyarakat. Bila dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, penerapan fungsi sosial budaya dalam keluarga akan membantu keluarga membentuk norma tingkah laku pada anak dan membina kemampuan sosialisasi anak untuk kemudian mampu menerapkan nilai-nilai kultural dalam keluarga (Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014). Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kampung KB yang memang dinamika masyarakatnya berkaitan dengan adat dan budaya, atau kampung yang masih menerapkan sistem adat, lebih mampu menerapkan fungsi ini.

Sama halnya dengan penerapan fungsi sosial budaya, secara merata, di semua

Kampung KB binaan masih ada keluarga yang kurang menerapkan fungsi cinta kasih dalam keluarga. Bila dikaitkan dengan tipologi keluarga yang ditemukan dalam penelitian ini, temuan ini menjadi mungkin terjadi dikarenakan responden yang terlibat juga berasal dari keluarga yang tidak utuh. Sehingga, ketidakutuhan dalam keluarga dapat menjadi hambatan untuk menerapkan fungsi cinta kasih secara maksimal. Hal ini perlu menjadi sebuah perhatian bagi pemerintah, bahwa tidak semua ketidakmampuan penerapan tersebut dikarenakan pengetahuan keluarga, masih ada kemungkinan bahwa kurangnya penerapan bisa terkait dengan tipologi keluarga itu sendiri. Sehingga asumsi ini perlu diukur lebih lanjut.

Pada fungsi perlindungan, peneliti menemukan mayoritas cukup baik dalam menerapkannya. Artinya, sebagian besar keluarga masih belum maksimal menerapkan fungsi perlindungan. Sementara fungsi ini, sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam keluarga sehingga keharmonisan keluarga dapat terjalin (Peraturan Pemerintah Nomor 87, 2014). Apabila keluarga tidak mampu secara maksimal menerapkan fungsi ini, maka keluarga berpotensi tidak mampu melindungi anggota keluarga khususnya anak, dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan fisik, psikologis dan sosialnya. Hal ini berarti keluarga tidak mampu menjamin keamanan dan kenyamanan, baik dalam hal relasi dalam keluarga, sosial, maupun hak terhadap kesehatan.

Terkait penerapan fungsi reproduksi, ditemukan bahwa mayoritas mampu menerapkan fungsi ini dengan cukup baik dan baik. Meski demikian, penelitian ini menggarisbawahi temuan terkait masih ada keluarga yang kurang menerapkan fungsi ini. Ini menjadi catatan penting, dikarenakan penerapan fungsi ini bertujuan agar keluarga mampu meneruskan keturunan dan memelihara serta merawat anggota keluarganya, serta memelihara kesehatan

reproduksi dalam keluarga (Peraturan Pemerintah Nomor 87, 2014).

Dari hasil penelitian, peneliti mendapatkan bahwa konsep terkait fungsi reproduksi ini masih sangat konservatif, yaitu terkait seksualitas individu. Sehingga, keluarga yang menjadi responden mengakui bahwa pemahaman terkait konsep fungsi reproduksi ini masih berkisar antara penggunaan KB dan jumlah anak. Pemahaman ini berbanding terbalik dengan konsep terkait fungsi reproduksi, yang mana fungsi ini mencakup kemampuan keluarga dalam menjaga kesehatan reproduksi anggota keluarganya, sehingga mampu menentukan usia ideal menikah bagi anggota keluarganya. Selain itu, fungsi ini juga akan mampu mencegah terjadinya kasus pernikahan dini ataupun angka kematian ibu dan bayi.

Kemudian, terkait penerapan fungsi sosialisasi dan pendidikan, ditemukan mayoritas keluarga menerapkan fungsi ini dengan cukup baik dan baik. Ini berarti, keluarga yang di lima Kampung KB binaan tersebut mampu menerapkan fungsi tersebut, meskipun belum optimal. Peneliti menemukan bahwa, keluarga sudah mampu menerapkan salah satu indikator dalam fungsi tersebut, dimana keluarga mampu mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta mampu memfasilitasi pendidikan anak dengan cara menyekolahkan anak. Aplikasi yang dilakukan oleh keluarga telah selaras dengan fungsi keluarga menurut BKKBN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014.

Sementara itu, peneliti menemukan pula bahwa keluarga mampu menerapkan fungsi ekonomi dengan cukup baik dan baik. Yang berarti keluarga mampu mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Keluarga juga mampu mengatur kebutuhan finansial berdasarkan prioritas dalam keluarga. Selain itu, keluarga juga mampu menerapkan konsep berhemat dan menabung. Ini berarti, keluarga telah mampu mengelola keuangan dan kebutuhan

ekonominya. Selaras dengan hasil tersebut, BKKBN mengemukakan pula bahwa fungsi ekonomi adalah fungsi dimana keluarga mampu mencari sumber penghasilan dan manajemen finansial berdasarkan prioritas kebutuhan keluarga (Peraturan Pemerintah Nomor 87, 2014).

Terakhir, peneliti menemukan bahwa keluarga mampu menerapkan fungsi pembinaan lingkungan dengan baik pada Kampung KB Percontohan. Peneliti mencatat bahwa mayoritas keluarga mampu memodifikasi lingkungan yang lebih *eco friendly*. Keluarga juga mampu memanfaatkan lingkungan tanpa merusak kondisi sekitar. Rerata keluarga telah mampu memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan tanaman obat keluarga (toga). Keluarga juga mampu mengelola sampah rumah tangga dan membuangnya pada tempat yang telah disediakan. Terkait penggunaan listrik, mayoritas keluarga mampu menghemat penggunaan listrik dengan menghidupkan alat elektronik sesuai dengan kebutuhan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keluarga telah mampu menjalankan fungsi pembinaan lingkungan. Yang mana, fungsi tersebut dapat dijalankan dengan melakukan perubahan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan (Wirdhana, I., et al., 2012).

Keberhasilan keluarga dalam menerapkan fungsi tersebut erat kaitannya dengan peran lintas sektor terkait. Dimana keluarga di Kampung KB Percontohan mendapatkan fasilitas dari lintas sektor yang mendorong keluarga mampu memaksimalkan fungsi tersebut.

Selain gambaran penerapan 8 fungsi keluarga yang diukur, peneliti juga melakukan eskplorasi terhadap keterlibatan lintas sektor dalam memaksimalkan penerapan 8 fungsi tersebut. Melalui eskplorasi tersebut, didapatkan 4 tema utama yaitu:

(1) Jenis lintas sektor yang terlibat

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa peranan lintas sektor sangatlah penting dalam mengakomodasi masyarakat

menerapkan 8 fungsi keluarga. Peneliti menemukan bahwa sektor yang terlibat dalam pengembangan kampung KB di wilayah provinsi Kalimantan Selatan berasal dari sektor pemerintahan dan sektor swasta. Sektor terkait yang terlibat dalam pengembangan kampung KB memiliki staf khusus yang bertujuan untuk proses koordinasi dengan wilayah binaan sektor tersebut. Rerata dari sektor yang terlibat berasal dari sektor pemerintahan.

(2) Program kegiatan yang dijalani

Program kegiatan yang dijalani masing-masing sektor terkait disesuaikan dengan program mereka dan kebutuhan dari desa yang dibina. Program-program yang diberikan oleh sektor terkait lebih banyak mendukung fungsi kesehatan dan fungsi ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program berjalan secara terstruktur dan terkoordinasi dengan pihak desa terkait. Koordinasi yang terstruktur ini diakui oleh lintas sektor terkait, menjadikan kegiatan pembinaan tidak menemukan hambatan berarti. Selain itu, untuk memaksimalkan pembinaan yang diberikan, lintas sektor terkait juga menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan. Adapun fasilitasi tersebut sebagian besar berupa fasilitas umum yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi ekonomi dan kesehatan masyarakat.

(3) Pengetahuan terkait 8 fungsi keluarga

Hasil temuan penelitian juga mendapatkan bahwa ada lintas sektor yang tidak mengetahui 8 fungsi keluarga, tetapi seluruh lintas sektor yang diwawancarai mengetahui keberadaan kampung KB. Program-program yang dilaksanakan juga selalu dilakukan monitoring dan evaluasi, baik setahun sekali maupun sebulan sekali. Ini berarti, tidak semua lintas sektor yang terlibat tahu terkait 8 fungsi keluarga. Meski demikian, semua lintas sektor mengetahui status desa yang menjadi binaan mereka adalah kampung KB.

(4) Keterlibatan lintas sektor berkaitan erat dengan kesadaran dan keaktifan masyarakat

Peneliti menemukan fakta menarik dari proses pembinaan yang dilakukan oleh lintas sektor yang ditemui. Seluruh sektor yang ditemui mengungkapkan hal yang sama bahwa program mereka bisa berjalan dikarenakan ada koordinasi yang baik dari aparat desa dan pihak sektor terkait. Dari sini, peneliti berpendapat bahwa kelancaran program ataupun peranan lintas sektor sangat berkaitan erat dengan kesadaran dan keaktifan masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh, kampung KB Simpang 4 menjadi kampung KB yang berkembang dengan sangat pesat. Program pengembangan yang mereka miliki merupakan hasil koordinasi terstruktur dari dinas terkait dengan masyarakat. Di sisi lain, Kampung KB Bitahan Baru menjadi contoh peranan lintas sektor berkaitan erat dengan kesadaran dan keaktifan masyarakat. Kemampuan aparat desa merancang program dan menawarkannya ke pihak swasta dengan metode lelang membuat sektor swasta dapat berperan dalam proses pembinaan masyarakat sekitarnya.

Temuan-temuan yang telah dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa lintas sektor terkait telah melakukan perannya dengan baik. Akan tetapi, beberapa lintas sektor terutama lintas sektor swasta masih belum mengetahui dan memahami terkait 8 fungsi keluarga. Sehingga hal ini membuat program pembinaan dan pendampingan yang mereka rancang menjadi terbatas hanya pada peran ekonomi dan kesehatan saja. Bila dikaitkan dengan gambaran penerapan 8 fungsi keluarga yang sebelumnya dibahas, dapat dilihat salah satu alasan mengapa fungsi pembinaan lingkungan dan fungsi ekonomi mampu diterapkan oleh keluarga di 5 kabupaten dengan optimal, sangat erat kaitannya dengan peran lintas sektor dalam menyediakan lingkungan dan fasilitas yang mendukung. Meskipun pada hasil wawancara ada temuan yang bertolak belakang terkait fungsi reproduksi dan perlindungan antara lintas sektor dan keluarga. Dimana hasil ukur terhadap 2 indikator tersebut menunjukkan hasil cukup,

bahkan ada yang kurang, sementara lintas sektor kesehatan sangat berperan maksimal dalam fungsi ini. Hal ini menurut peneliti, perlu diukur atau dieksplor lebih lanjut, untuk memastikan apakah ada kaitannya antara partisipasi keluarga dengan keoptimalan peran lintas sektor.

SIMPULAN

Temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, menunjukkan bahwa mayoritas keluarga yang berada di 5 Kampung KB Percontohan di wilayah binaan BKKBN Kalimantan Selatan telah mampu menerapkan dengan baik 8 fungsi keluarga. Meskipun pada beberapa indikator fungsi tersebut masih ada yang kurang baik penerapannya, namun secara garis besar keluarga mampu menggerakkan fungsi-fungsi tersebut. Kemampuan keluarga menerapkan 8 fungsi tersebut, erat kaitannya dengan peranan lintas sektor. Keterlibatan lintas sektor dalam menyediakan fasilitas sangat membantu masyarakat mengoptimalkan 8 fungsi tersebut. Terlebih pada kampung KB yang aktif secara mandiri melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, memudahkan lintas sektor untuk berpartisipasi dalam penerapan 8 fungsi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2020). *Rencana Strategis BKKBN 2020-2024*.
- Banovicnova, A., Levicka, J., & Veres, M. (2014). The impact of poverty on the family system functioning. *Procedia-Social and Behavioral Science*, 132, 148-153.
doi:10.1016/j.sbspro.2014.04.291.
Diakses tanggal 10 oktober 2021.
- Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. (2020). *Bungai Rampai Kampung KB Provinsi Kalimantan Selatan*.
- BKKBN. (2020). *Kampung KB*. [Online] Available at: <https://kampungkb.bkkbn.go.id>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2021.
- Carlson, M. J., Magnuson, K. A. (2011). Low-Income Fathers' Influence on Children. *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 635 (2011): 95–116.
- Case, A., Paxson, C. (2002). "Parental Behavior and Child Health," *Health Affairs* 21 (2002): 164–78.
- CDC. (2017). *Reproductive Health*. [Online] Available at: <https://www.cdc.gov/nchs/fastats/reproductive-health.htm> Diakses pada tanggal 10 April 2021.
- CDC. (2019). *Sexual Risk Behaviors Can Lead to HIV, STDs, & Teen Pregnancy*. [Online] Available at: <https://www.cdc.gov/HealthyYouth/sexualbehaviors/index.htm> Diakses pada tanggal 10 April 2021.
- Dai, L. & Wang, L. (2015). Review of family functioning. *Journal of Social Sciences*, 3(12),134-141.
Doi:10.4236/jss.2015.312014
- Dimiyati, Azima. (2018). *Peran dan Tugas Perempuan Dalam Keluarga*. Pengabdian kepada Masyarakat UBL Journal.
- Ho, T. W., Mei, C. J., Wei, H. C., Chin, T. T. (2016). Relationship among Family Support, Love Attitude, and Well-being of Junior High School Students. *Universal Journal of Educational Research* 4(2): 370-377, 2016. [Online] Available at: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1089688.pdf>. Diakses pada tanggal 10 April 2021.
- Hood Jr, R. W., Hill, P. C., & Spilka, B. (2009). *The psychology of of religion: An empirical approach 4eds*. New York: The Guilford Press. Diakses tanggal 21 Juni 2021.
- Krok, D. (2016). *Examining the Role of Religion In a Family Setting: Religious Attitudes And Quality of Life Among Parents and Their Adolescent Children*. [Online] Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/full/1>

- 0.1080/13229400.2016.1176589
Diakses pada tanggal 10 April 2021.
- Normajatun, Malawat, S.H., Fibriyanita, F. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana - Kampung Baiman (KKB-KB) di Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik As Siyasah*, 3 (2), November 2018.
- Novitasari, Kusuma, Aji Ratna, & Zulfiani, Dini. (2021). Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Publik*. Diakses tanggal 18 Oktober 2021.
- Pamungkas, R. A., Chramroomsawasdi, K., & Vatanasomboon, P. (2018). Family functioning integrated with diabetes self-management: A concept analysis. *Frontiers of Nursing*, 5(3), 199-206. doi:10.1515/fon-2018-0027
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem Informasi Keluarga.
- Rasily, Ar-Oktarisa., Dewi, Puspita Kusuma. (2016). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengetahuan Orang Tua Mengenai Kelainan Genetik Penyebab Disabilitas Intelektual Di Kota Semarang. *Jurnal Kedokteran Diponegoro* Vol. 5 Nomor 4. (Diakses Tanggal 15 Januari 2020)
- Willis, Sofyan S. 2009. *Konseling Keluarga*. Bandung: Alfabeta.
- Wirdhana, I., et al.(2012). *Komunikasi Efektif Orangtua dengan Remaja*. Jakarta: BKKBN.
- WHO. (2016). *Public Health and Environment*. [Online] Available at: <https://www.who.int/data/gho/data/themes/public-health-and-environment>. Diakses pada tanggal 10 April 2021.
- WHO. (2017). *Maternal and Reproductive Health* <https://www.who.int/data/gho/data/themes/maternal-and-reproductive-health> Diakses pada tanggal 10 April 2021.
- Zultha, N. (2017). *The Implementation of Kampung KB Program to Reduce Poverty (A Study at Kota Karang Raya Village, Sub-District of Teluk Betung Timur, Bandar Lampung)*. Skripsi Tidak Diterbitkan.